

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berkembangnya dunia usaha atau industri. Khususnya di negara-negara berkembang, sektor usaha yang dikenal dengan nama UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) mempunyai potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menyediakan lapangan kerja baru. Menurut definisi Kementerian Koperasi dan UKM, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ini juga merupakan salah satu penopang utama perekonomian Indonesia yang berperan strategis dalam menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Kementerian Koperasi dan UKM, 2021).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia yang dimana sektor ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang tetapi juga berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), UMKM menyumbang sekitar 60,51% dengan perincian Rp 19.588 triliun total PDB Indonesia tahun 2022 dan kontribusi UMKM sekitar ± Rp 11.850 triliun terhadap PDB Indonesia dengan jumlah unit usaha mencapai 65,47 juta pada tahun 2023. Selain itu, UMKM mampu menyerap 96,92% tenaga kerja dengan perkiraan sekitar ± 139,5 juta orang tenaga kerja UMKM dari Total angkatan kerja Indonesia 144,01 juta orang, menjadikannya sektor vital dalam

mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (BPS, 2023).

Pada dasarnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu komponen penting dalam struktur perekonomian Indonesia. UMKM didefinisikan sebagai usaha yang memiliki skala kecil dan menengah, yang dikelola oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa. UMKM berperan sebagai motor penggerak ekonomi, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. UMKM memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan besar. Mereka umumnya lebih fleksibel, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar.

Berbagai wilayah di Indonesia turut serta dalam menyumbang UMKM pada setiap provinsinya, tidak terkecuali di provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara memiliki sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sangat vital bagi perekonomian provinsi ini dan juga telah menjadi penggerak utama perekonomian daerah dengan kontribusi signifikan terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja. UMKM di Sumut menyumbang Rp 494,4 triliun setara dengan 58% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari total PDRB Sumut sekitar Rp 852,4 triliun. (BPS Sumut, 2023), dan menyerap 5,14 juta pekerja setara dengan 85% tenaga kerja dari total angkatan kerja 6,05 juta. (Disnakertrans Sumut, 2023).

Berdasarkan data BPS tahun 2023, sektor UMKM di provinsi Sumatera Utara didominasi oleh usaha mikro yang bergerak di bidang perdagangan,

pertanian, perikanan, kuliner (bika ambon, dodol, sambal, dll), dan kerajinan tradisional seperti tenun ulos serta anyaman rotan. Sektor-sektor ini menjadi sektor unggulan yang membawa keberadaan UMKM hingga saat ini.

Wilayah di Sumatera Utara memiliki UMKM yang juga menjadi penyokong perekonomian setiap daerahnya. Seperti yang terdapat di Kabupaten Labuhanbatu Utara, kabupaten ini memiliki kekayaan potensi UMKM yang sangat beragam. Sektor pertanian dan perkebunan menjadi basis UMKM terbesar, dengan komoditas unggulan berupa kelapa sawit, karet, dan padi. Industri pengolahan hasil perkebunan seperti pembuatan minyak kelapa sawit skala kecil dan pengolahan karet mentah telah menciptakan rantai nilai ekonomi yang signifikan. Selain itu, sektor kerajinan tradisional berbasis rotan dan bambu juga berkembang pesat yang telah memiliki pasar hingga ke luar daerah. (BPS Labuhanbatu Utara, 2023)

UMKM Kecamatan Kualuh Hulu keberadaannya berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal dan penyokong kehidupan masyarakat. Selain itu, di Kecamatan Kualuh Hulu juga UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian lokal, dengan berbagai jenis usaha seperti perdagangan, pertanian/perikanan, dan jasa yang berkembang pesat. Keberadaan UMKM di daerah ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial masyarakat, terutama di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Kecamatan Kualuh Hulu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang memiliki potensi ekonomi yang beragam. Secara geografis, kecamatan ini memiliki karakteristik topografi yang bervariasi, mulai

dari dataran rendah hingga perbukitan, serta dialiri oleh beberapa sungai yang menjadi sumber daya air penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi geografis yang beragam ini memberikan peluang bagi berkembangnya berbagai jenis usaha, mulai dari pertanian/perikanan, perdagangan, hingga jasa.

Pertumbuhan UMKM di Kecamatan Kualuh Hulu menunjukkan tren positif dengan kemunculan unit-unit usaha baru di bidang kuliner tradisional, perdagangan, dan industri rumahan pengolahan hasil pertanian. Perkembangan ini didukung oleh program pemerintah daerah melalui pelatihan kewirausahaan yang diberikan oleh dinas perdagangan dan koperasi UKM Labuhanbatu Utara. Berdasarkan data Dinas Koperasi & UKM Tahun 2023 jumlah unit usaha di Kecamatan Kualuh Hulu (2022-2023) wilayah ini memiliki 75 unit UMKM aktif. Seiring berjalannya waktu, jumlah unit usaha terus bertambah, adapun banyaknya data UMKM tahun 2024 yang tersebar di Kecamatan ini dimuat melalui tabel berikut :

Tabel 1.1 Jumlah UMKM Kecamatan Kualuh Hulu Tahun 2024

No	Desa/Kelurahan	Jumlah
1.	Aek Kanopan	21
2.	Aek Kanopan Timur	14
3.	Pulo Dogom	10
4.	Kuala Beringin	9
5.	Sukarame	8
6.	Londut (Perkebunan Londut)	7
7.	Parpaudangan	6
8.	Sukarame Baru	6
9.	Perkebunan Kanopan Ulu	5
10.	Perkebunan Hanna	5
11.	Perkebunan Labuhan Haji	5
12.	Perkebunan Mambang Muda	4
13.	Sonomartani	4
Total Unit Usaha		104

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024

Perkembangan UMKM di daerah ini menunjukkan potensi yang signifikan, namun belum didukung oleh pemahaman yang mendalam tentang pola persebaran spasialnya. Meskipun jumlah UMKM di Kecamatan Kualuh Hulu terus meningkat dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian lokal, masih terdapat ketimpangan dalam distribusi lokasi usaha. Beberapa wilayah memiliki konsentrasi UMKM yang tinggi, sementara wilayah lain justru minim aktivitas ekonomi. Selain itu, belum adanya pemetaan yang komprehensif mengenai lokasi dan sebaran UMKM di Kecamatan Kualuh Hulu menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya pengembangan ekonomi daerah. Saat ini, data tentang UMKM masih tersebar dan belum terintegrasi dalam sebuah sistem yang memungkinkan analisis mendalam tentang distribusi spasialnya.

Kecamatan Kualuh Hulu menghadapi tantangan signifikan dalam pengembangan ekonomi lokal karena belum memiliki sistem pemetaan UMKM yang menyeluruh. Kondisi ini menciptakan berbagai masalah yang saling berkaitan dan menghambat pertumbuhan usaha kecil di wilayah tersebut.

Berdasarkan penelitian terbaru dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara (2023), ketiadaan data spasial yang akurat tentang lokasi dan sebaran UMKM telah menyebabkan berbagai program pemerintah kurang efektif dalam menjangkau sasaran. Banyak bantuan dan pendampingan usaha tidak sampai kepada pelaku UMKM yang benar-benar membutuhkan, terutama yang berada di daerah-daerah terpencil. Survei yang dilakukan BAPPEDA (2023) mengungkapkan bahwa sebagian besar program bantuan justru lebih banyak dinikmati oleh UMKM

yang berlokasi di sepanjang jalan utama, sementara usaha-usaha di pedesaan sering terabaikan.

Pola persebaran UMKM yang tidak merata semakin memperparah kesenjangan ekonomi antarwilayah. Data sementara dari BPS Kecamatan (2023) menunjukkan bahwa hampir 80% UMKM terkonsentrasi di sepanjang Jl. Lintas Kualuh, sedangkan daerah-daerah pedesaan hanya memiliki sedikit unit usaha. Maka dari itu, dibutuhkan pemetaan yang komprehensif mengenai salah satu permasalahan ini seperti pemetaan berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG).

Pemahaman pola sebaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memerlukan penggunaan pemetaan berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Gambaran menyeluruh mengenai sebaran usaha di suatu wilayah dapat diperoleh dengan memanfaatkan GIS untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memvisualisasikan data spasial secara tepat mengenai lokasi dan sebaran UMKM. Pemetaan ini memungkinkan identifikasi kluster ekonomi, yaitu area dengan konsentrasi UMKM yang tinggi, serta wilayah-wilayah yang masih membutuhkan intervensi pengembangan (Bappenas, 2022). Selain itu, GIS membantu mengidentifikasi variabel-variabel seperti potensi pasar, aksesibilitas infrastruktur, dan aksesibilitas yang mempengaruhi distribusi UMKM (Goodchild, 2020). Dengan informasi ini, pemerintah dan para pemangku kepentingan dapat merancang kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran, seperti pembangunan infrastruktur, penyaluran bantuan, atau pengembangan kluster ekonomi. Tanpa pemetaan yang akurat, upaya pengembangan UMKM memungkinkan tidak efektif dan berpotensi memperlebar ketimpangan ekonomi antardaerah. Oleh karena itu,

perencanaan pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan memerlukan penggunaan pemetaan berbasis GIS.

Dalam konteks ini sebuah sistem informasi geografis diperlukan dalam hal menganalisis suatu lokasi atau wilayah tertentu dengan kajian yang diinginkan. Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah suatu sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan memvisualisasikan data geografis. SIG memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis spasial, seperti pemetaan, identifikasi pola, dan pemodelan geografis. Dalam konteks UMKM, SIG dapat digunakan untuk memetakan lokasi usaha, menganalisis pola persebaran, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi distribusi spasial. Seperti halnya menurut Bappenas (2021), penggunaan SIG dalam perencanaan pembangunan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan, terutama dalam pengembangan sektor ekonomi seperti UMKM. Oleh karena itu, analisis pola persebaran spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) juga menjadi penting untuk mengidentifikasi kluster ekonomi, memetakan area potensial, dan merumuskan strategi pengembangan yang lebih terarah dan efektif.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk dilakukan. Dengan memahami pola persebaran spasial UMKM, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dapat merancang kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan intervensi pengembangan, merancang infrastruktur yang mendukung pertumbuhan UMKM, atau mengembangkan kluster ekonomi baru.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi model untuk analisis spasial UMKM di daerah lain dengan karakteristik serupa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi Kecamatan Kualuh Hulu, tetapi juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan UMKM di tingkat regional maupun nasional.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang distribusi spasial UMKM, dan jenis jenis UMKM yang tersebar pada lokasi penelitian serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk mendukung perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih efektif dan merata di Kecamatan Kualuh Hulu serta kontribusi yang signifikan bagi pengembangan UMKM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Belum adanya pemetaan yang komprehensif mengenai lokasi dan sebaran UMKM di Kecamatan Kualuh Hulu.
2. Kurangnya data spasial yang terintegrasi untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan UMKM di daerah tersebut.
3. Potensi UMKM yang belum tergali secara optimal karena kurangnya informasi tentang kluster atau pusat-pusat ekonomi.
4. Adanya ketimpangan distribusi UMKM antarkelurahan/desa, yang dapat memengaruhi aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi lokal.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini akan membatasi masalah tersebut agar lebih jelas dan terfokus. Maka dari itu, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu : menganalisis pola dan faktor persebaran spasial usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah disebutkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja jenis UMKM yang terdapat di Kecamatan Kualuh Hulu dan karakteristik masing-masing jenis usaha tersebut?
2. Bagaimana pola persebaran UMKM di Kecamatan Kualuh Hulu ?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pola persebaran spasial UMKM di Kecamatan Kualuh Hulu ?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi jenis UMKM yang terdapat di Kecamatan Kualuh Hulu, dan karakteristik masing-masing jenis usaha tersebut.
2. Menganalisis pola persebaran spasial UMKM di Kecamatan Kualuh Hulu.
3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pola persebaran spasial UMKM di Kecamatan Kualuh Hulu.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini merupakan dampak mengenai pencapaian dari suatu tujuan, adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian mengenai pola persebaran UMKM di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara diharapkan memberikan dan memperluas wawasan dalam pemetaan persebaran UMKM sehingga dapat memberikan manfaat serta masukan bagi pemerintah setempat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan berupa informasi kepada masyarakat luas mengenai keberadaan UMKM yang ada di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara serta dapat memberikan masukan informasi terbaru kepada instansi pemerintah setempat.